

BAB V

PENYELENGGARAAN

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah melalui dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Walaupun dana-dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun dana tersebut dibelanjakan di daerah, baik dalam bentuk belanja fisik maupun non-fisik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota / kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diterima pada tahun 2015 dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

A. Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga.

Adapun penyelenggaraan Dekonsentrasi pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Dekonsentrasi

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- Undang-Undang Republik Indonesia atau UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

2. Instansi Pemberi Dekonsentrasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Penyelenggaraan Dekonsentrasi yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 bersumber dari 23 (dua puluh tiga) Kementerian dan dilaksanakan oleh 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Daftar Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

NO.	KEMENTERIAN	SKPD PROVINSI
1	Kementerian Dalam Negeri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
		Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Timur
		Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
		Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2	Kementerian Pertanian	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur
		Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
		Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur
3	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
6	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
7	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
8	Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
		Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur
		Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
12	Kementerian Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
13	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur
15	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
16	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur
18	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur
19	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
20	Arsip Nasional Republik Indonesia	Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur

21	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Umkm Provinsi Kalimantan Timur
22	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
23	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

3. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Dekonsentrasi yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebanyak 57 program dan 187 kegiatan mencapai realisasi rata-rata 67,75%.

Program kegiatan melalui Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Program Bina Administrasi Kewilayahan, meliputi kegiatan; Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah; Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran; Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Hasil pelaksanaan program kegiatan adalah berupa laporan dan 161 Aparat yang telah dilatih penanggulangan bencana dan pemilukada.
2. Program Bina Pembangunan Daerah, kegiatan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Laporan pengendalian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015.
3. Program Bina Pemerintahan Desa, kegiatan; Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pelatihan aparatur pemerintahan desa di 2 desa.
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kegiatan; Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah

serta Kerja Sama Daerah; Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Laporan Penyelenggaraan Adminduk.

5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, meliputi kegiatan; Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: promosi, pemberdayaan Lumbung Pangan sebanyak 2 Unit; beberapa Laporan terkait dengan Kondisi harga pangan pokok, kerawanan pangan; ketersediaan pangan dan akses pangan; pemantauan, monitoring, evaluasi desa mandiri pangan; Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan sebanyak 5 Desa; Penanganan Rawan Pangan di 7 Lokasi; Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; 2 Kawasan Mandiri Pangan; 40 desa pendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
6. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian, melalui kegiatan; Pengembangan Pemasaran Domestik; Pengembangan Usaha dan Investasi. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Pengembangan informasi pasar 1 unit.
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui kegiatan; Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian; Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; Fasilitas Pupuk dan Pestisida; Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Supervisi dan Pembinaan terkait Aspek Air, Lahan,

Alsintan, Pupuk, Pestisida.

8. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan, melalui kegiatan; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Buah, Florikultura, Sayuran dan Tanaman Obat; Pengembangan Sistem Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; Pengembangan Mutu dan Standardisasi; Pengembangan Pemasaran Domestik; Pengembangan Usaha dan Investasi; Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Hortikultura; Fasilitas Pupuk dan Pestisida; Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain, Registrasi Kebun 20 Kebun dan 8 lahan usaha, Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah Tanaman Florikultura, sarana dan prasarana budidaya, Kawasan Tanaman Sayuran 8 Ha, 30.000 Benih Florikultura dan 65.000 Batang Tanaman Buah, Penguatan 4 Lembaga, sertifikasi dan pengawasan mutu benih, Pemasarakatan Benih Bermutu, 21 Kelompok Sekolah Lapang, 2 Rekomendasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; 1 Unit Laboratorium.
9. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, melalui kegiatan; Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian; Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Pelatihan Teknis Pertanian 120 orang; fasilitasi Kelembagaan Pelatihan Pertanian; Pelatihan tenaga Pertanian sebanyak 7 orang, 142 lembaga penyuluhan pertanian dan 1.254 tenaga penyuluh pertanian; Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di 264 Lokasi Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian.
10. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan, melalui kegiatan; Dukungan Perlindungan Perkebunan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Pemberdayaan 3 Unit Perangkat kualitas mutu tanaman.

11. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, melalui kegiatan; Peningkatan Produksi Ternak; Peningkatan Produksi Pakan Ternak; Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis; Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit; Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain; Bimbingan Teknis Budidaya Ternak Potong; Fasilitasi Penerapan *Good Farming Practices* Sapi Perah 1 Kelompok; Bantuan Semen Beku dan Operasional Inseminasi Buatan; Nitrogen Cair; Penguatan Manajemen Inseminasi Buatan; Perbaikan Manajemen Intensifikasi Kawin Alam; Bimbingan Teknis Budidaya Unggas dan Aneka Ternak; Penguatan Kelembagaan Peternak; Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan Pelayanan Petugas; Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pakan; Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan dan Peredaran Imbuhan/Pelengkap Pakan; Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rabies, Unggas, Jembrana dan Parasiter; Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau 800 dosis; Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik; Pengamatan Penyakit Hewan; Pembinaan dan koordinasi Kesehatan Hewan; Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis; Operasional Pengujian Veteriner di Laboratorium Veteriner Daerah 16 unit; Pembinaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting; Pengawasan dan Koordinasi Perbibitan di Daerah; Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak; Supply Demand Bibit Ternak; Pewilayahan Sumber Bibit Ternak; Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perbibitan

Ternak; Penerapan Penjaminan asal Pangan hewan yang aman sehat utuh dan halal (ASUH) di rumah potong hewan; Fasilitas Unit Usaha dalam Proses Sertifikasi ASUH; Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemarkan Mikrobial 200 Sampel; Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet 57 Orang; Penguatan Manajemen Laboratorium Kesmavet; Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Zoonosis; Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Ternak dan Non Ternak.

12. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, melalui kegiatan; Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi; Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim; Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain; Pengelolaan produksi serealia, Penilaian Varietas, Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan; Perbanyak Benih Sumber tanaman pangan (BBI) 6 Ha; Sarana prasarana, peralatan laboratorium; Pedoman perlindungan tanaman pangan; Perencanaan, Database dan Informasi perlindungan tanaman pangan; Pelatihan teknis perlindungan tanaman pangan 55 Orang; Penanganan pasca panen tanaman pangan.

13. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, melalui kegiatan; Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Fasilitas Pengembangan Produk IKM, Peningkatan Kemampuan Sentra, Pembangunan Wira Usaha Industri, Peningkatan Kemampuan UPT, Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran.

14. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro, melalui kegiatan; Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah pengembangan industri agro unggulan daerah Kaltim.
15. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui kegiatan; Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri; Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan; Penyediaan Layanan Paud; Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan Dikmas. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain; Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring; 40 lembaga PAUD Baru; Bantuan Alat Permainan Edukatif di 20 Lembaga; Dokumen Evaluasi Program dan Anggaran Pembinaan PTK PAUDNI; Dokumen data dan Informasi PAUDNI.
16. Program Pendidikan Menengah melalui kegiatan; Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA; Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK; Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain; Dokumen Perencanaan dan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program; Penerapan Pendidikan Karakter Bangsa di 9 Sekolah; Penyertaan siswa untuk mengikuti Lomba Sains Nasional/Internasional; Olahraga dan Seni Tingkat Nasional /Internasional; Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Lainnya; Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 4.456.076 Siswa; Penerapan Kurikulum 2013 di 140 Sekolah; Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK;

2 Naskah Pedoman Standar Pembelajaran; Data Pokok Pendidikan Menengah.

17. Program Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui kegiatan; Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah; Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar; Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain; Peningkatan Mutu Pembelajaran di 14 sekolah; Penyertaan Siswa dalam lomba, festival, dan olimpiade sebanyak 146 Orang; Penerapan Kurikulum 2013 di 32.115 Sekolah; Bantuan Operasional SMP Terbuka untuk 688 Siswa; Penerapan ekstrakurikuler di 183 Sekolah; Beasiswa Bakat dan Berprestasi untuk 330 Siswa; Standarisasi dan akreditasi di 18 Sekolah; Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di 1.006 Sekolah.
18. Program Guru dan Tenaga Kependidikan, melalui kegiatan; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas; Pembinaan Guru Pendidikan Dasar; Pembinaan Guru Pendidikan Menengah. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain; Pendataan calon penerima tunjangan profesi guru dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat Menengah diseluruh Kabupaten/Kota.
19. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, melalui kegiatan; Pembinaan Administrasi Kepegawaian; Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara; Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan; Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji; Pengelolaan Data dan Informasi; Peningkatan Kesehatan

Jemaah Haji; Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain; Pengangkatan Pegawai sebanyak 30 Tenaga; Kegiatan, Pembinaan, Keuangan dan Kekayaan Negara; Dokumen Kebijakan, Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kementerian Kesehatan, 50 Paket Data dan Informasi Kesehatan; Layanan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Bidang Kesehatan; Pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan jaminan dan Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan; Kelompok Kerja Operasional UKBM atau Forum Peduli Kesehatan dan Penyusunan Pembentukan Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan; Kemitraan dengan dunia usaha/swasta dan pihak lain; Implementasi Kampanye Kesehatan; Peran serta organisasi Kemasyarakatan dan Pihak Lain.

20. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, melalui kegiatan; Pembinaan Gizi Masyarakat; Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak; Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga; Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif; Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- 10 Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan pembinaan Gizi masyarakat; Peningkatan kapasitas SDM Teknis dan atau manajemen sebanyak 216 orang; Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye/Gerakan Masyarakat Dalam Rangka Pembinaan Gizi; Pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan Buku/Modul sebanyak 6.100 Buku; Laporan Perencanaan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan Barang Milik.

- 10 Kabupaten/Kota yang telah ditingkatkan dalam hal Pelayanan Kesehatan Neonatus; Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita Dan Pra Sekolah; Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah; Pelayanan Kesehatan Anak Remaja; Pelayanan Perlindungan Kesehatan Anak.
 - Dokumen Hasil Pertemuan Teknis dan Manajemen; Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan sebanyak 45 Laporan; SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen sebanyak 322 Orang; Alat Bantu Deteksi Resiko Ibu Hamil sebanyak 250 Paket.
 - Dokumen Perencanaan sebanyak 10 Dokumen; Laporan Pengelolaan BMN; Laporan Evaluasi Program Bina Gizi dan KIA; dan Laporan Pengelolaan Data dan Informasi.
 - Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 72 Orang; Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga sebanyak 2 Fasilitas; Dokumen kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi kesehatan sebanyak 14 Dokumen; Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi, Monitoring dan pendampingan sebanyak 11 Laporan.
 - Laporan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Advokasi 3 Laporan laporan Pembinaan Teknis, Supervisi, Monitoring Dan Pendampingan 2 Laporan; SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen sebanyak 20 Orang; Dokumen Data Dan Informasi; Dokumen Dukungan Manajemen SP3T dan Dukungan Penapisan SP3T.
21. Program Pembinaan Upaya Kesehatan, melalui kegiatan; Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar; Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;
- Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan

Kesehatan Rujukan sebanyak 4 Laporan.

- Laporan Pembinaan Program dan Rencana Kerja/Teknis sebanyak 6 Laporan.

22. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, melalui kegiatan; Pembinaan Surveillance, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra; Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Penyehatan Lingkungan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Tenaga Imunisasi yang terlatih sebanyak 343 Orang; Penguatan Kewaspadaan Dini KLB Penyakit di Provinsi Kalimantan Timur; Melakukan penemuan kasus discarded campak dan pendataan capaian cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di 10 Kabupaten/Kota.
- Penurunan IR DBD per provinsi 112 Kasus Kabupaten/Kota dengan cakupan penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar di 10 Kabupaten/Kota; Melakukan pengendalian Rabies sesuai standar di 3 Kabupaten/Kota endemis rabies; Advokasi/sosialisasi/koordinasi POMP Filariasis pada di 3 Kabupaten/Kota; Melakukan kegiatan surveilans/pengendalian vektor di 3 Kabupaten/Kota.
- Layanan HIV AIDS oleh Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan atau advokasi tentang Tifoid pada kelompok berisiko di 10 Kabupaten/Kota; Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah melaksanakan layanan TB dengan strategi DOTS sebanyak 10 Fasyankes; 15 Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA); Kabupaten/Kota yang melakukan Sosialisasi dan atau advokasi tentang Hepatitis Virus di 3 Kabupaten/Kota; Bumil dan kelompok berisiko yang melakukan deteksi dini hepatitis B dan

atau C sebanyak 10.200 Orang.

- Melaksanakan monitoring faktor risiko PTM melalui kegiatan Posbindu PTM pada kelompok masyarakat khusus di 10 Kabupaten/Kota; Perempuan Usia 30-50 th yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara sebanyak 7.952 Orang; Penduduk usia >15 th yang melakukan pemeriksaan gula darah sebanyak 170.640 Orang; Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang melakukan penanganan kasus Hipertensi 60 fasyankes primer; Peningkatan jumlah peraturan KTR di Kab/Kota sebanyak 3 Kabupaten/Kota; 10 Layanan dalam Upaya Berhenti Merokok di Fasyankes Primer; Penduduk usia >15th yang telah dilakukan pemeriksaan obesitas sebanyak 2.000 orang.
- Tenaga terlatih Bidang STBM 66 Orang; Kabupaten/Kota yang melaksanakan STBM 10 lokasi; Dokumen Perencanaan dan Anggaran Penyehatan Lingkungan; Laporan keuangan dan BMN Penyehatan Lingkungan; Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyehatan Lingkungan 7 Dokumen; Peta Kualitas Air Minum; TPM memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten/Kota sebanyak 4 Unit.

23. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, melalui kegiatan; Peningkatan Pelayanan Kefarmasian; Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Sistem Pelaporan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan sebanyak 2 Laporan; Sistem Pelaporan Perizinan Distribusi Kefarmasian 2 Laporan; Biaya Operasional Instalasi Farmasi selama 12 Bulan; Output cadangan Laporan Manajemen Pengelolaan Obat Instalasi Farmasi serta Laporan Kegiatan dan

Pembinaan Umum; Profil kefarmasian dan alat kesehatan; Dokumen Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

24. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, melalui kegiatan; Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan; Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak; Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Pemeriksaan norma Ketenagakerjaan di 360 Perusahaan; Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di 1 Perusahaan; Pelaksanaan norma kerja perempuan dan anak di 360 Perusahaan; Penerapan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Smk3 sebanyak 360 Perusahaan; Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 9 Dokumen; Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan.
25. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas. Melalui Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Pelaksanaan pelatihan terbagi di 4 lokasi yaitu Kota Samarinda melaksanakan sebanyak 10 paket dengan jumlah peserta 100 orang, Kota Bontang sebanyak 10 paket dengan jumlah peserta 100 orang. Kota Balikpapan melaksanakan sebanyak 20 paket dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang. Dan Provinsi melaksanakan sebanyak 10 paket dengan jumlah peserta 100 orang. Dengan tingkat kelulusan seluruhnya sebesar 100%.
26. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, melalui Kegiatan : Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara

lain; Pengembangan keterampilan dan wirausahwan muda dilakukan dilokasi Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, realisasi pelatihan diikuti sebanyak 140 orang dari target 160 orang. Dimana Kutim diikuti sebanyak 60 orang dan Kukar 80 orang.

27. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Konsultasi teknis program, informasi pelaporan bidang HI dengan Kabupaten/Kota dihadiri 30 peserta dan dilaksanakan di kota Balikpapan.
- Pelatihan teknik negosiasi HI bagi pekerja/buruh, SP/SB dan pengusaha dihadiri sebanyak 150 peserta dan dibagi menjadi 3 angkatan. Masing-masing angkatan sebanyak 50 peserta. Dilaksanakan di kota Balikpapan dan kota Samarinda.
- Sosialisasi pengupahan dibagi menjadi 2 angkatan dan dihadiri 200 peserta. Setiap angkatan dihadiri sebanyak 100 peserta. Dilaksanakan di kota Balikpapan.
- Sosialisasi tata cara pembuatan PK, PP & PKB dibagi menjadi 2 angkatan. Setiap angkatan di hadiri 50 peserta dan total peserta sebanyak 100 orang. Dilaksanakan di kota Balikpapan.
- Sosialisasi jaminan sosialisasi terbagi 2 angkatan, masing-masing angkatan diikuti sebanyak 100 orang. Dilaksanakan dikota Balikpapan.
- Peningkatan kapasitas anggota LKS Bipartit terbagi 2 angkatan. Setiap angkatan diikuti 30 orang dan dilaksanakan di kota Samarinda.
- Peningkatan kapasitas pengurus SP/SB dibagi menjadi 2 angkatan masing-masing angkatan diikuti 30 orang peserta dan dilaksanakan di kota Samarinda.
- Sosialisasi tata cara pencehgahan perselisihan HI dibagi menjadi 2 angkatan masing-masing angkatan diikuti sebanyak

50 orang peserta dan dilaksanakan di kota Balikpapan.

- Sosialisasi tata cara pembentukan LKS Tripartit yang diikuti sebanyak 30 orang peserta dilaksanakan di kota Samarinda.
- Sosialisasi fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh terbagi menjadi 2 angkatan. Masing-masing angkatan diikuti sebanyak 50 orang peserta dan dilaksanakan di kota Samarinda.

28. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Pelaksanaan Rakorda pegawai pengawasan tenaga kerja provinsi kalimantan timur yang dilaksanakan di kota Samarinda di hadiri oleh 30 orang peserta dilaksanakan di kota Samarinda. Untuk selebihnya, kegiatan rakorda akan dilaksanakan oleh kabupaten kota. Sedangkan kegiatan pembinaan SDM K3 Provinsi Kalimantan Timur diikuti 30 orang peserta dan dilaksanakan di Kota Samarinda.

29. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, melalui kegiatan Perencanaan dan Penganggaran serta kegiatan Penyuluhan Sosial. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran Data/Informasi Pembangunan Kesejahteraan Pusat dan Daerah sebanyak 4 Dokumen dengan realisasi mencapai 96,58%. Serta Kegiatan penyuluhan sosial dalam penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial sebanyak 5 Laporan dengan realisasi mencapai 100%.

30. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, melalui kegiatan; Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial; Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan; Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat; Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- TMPN/TMP/MPN yang direhab dan dipelihara sebanyak 1 Unit; Laporan Keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/Pembinaan/Publikasi serta kegiatan pendukung Pelaksanaan Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; Generasi Muda yang mengikuti kegiatan Pra Manggala Indonesia, Internalisasi dan keterampilan transformasi Nilai K2KS sebanyak 460 Orang. Realisasi mencapai 87%.
- KUBE fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulasi UEP sebanyak 175 KUBE; Pendamping sosial yang mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 38 Orang; Laporan Keuangan/kinerja/monitor/evaluasi/koordinasi, pembinaan serta kegiatan pendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; Dokumen perencanaan/program/anggaran/data/informasi/kebijakan bidang penanggulangan kemiskinan dengan realisasi mencapai 98,87%.
- Keluarga plasma/keluarga rentan, wanita rawan social ekonomi (WRSE) yang mendapatkan bantuan sebanyak 70 KK; LK3 yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 15 Unit; Laporan keuangan/kinerja/monitoring/evaluasi/koordinasi/pembinaan/asistensi/publikasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial sebanyak 3 Laporan; TKSK yang mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan; Organisasi sosial yang mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan sebanyak 50 Organisasi Sosial; PSM yang mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan sebanyak 40 Orang; Karang taruna yang mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan sebanyak 55 Karang taruna; WKBSM yang mendapat peningkatan kapasitas, 10 Desa; CSR Kessos yang telah dibentuk sebanyak 15 Forum CSR; Family Care Unit yang melakukan pemberdayaan keluarga sebanyak 1 unit dengan

realisasi mencapai 87,55%.

- Rekomendasi hasil analisis, kajian, kebijakan bidang pemberdayaan KAT; Laporan Keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/Publikasi/Sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT; Dokumen perencanaan/Program/Anggaran/Data/Informasi/kebijakan pemberdayaan KAT dengan realisasi mencapai 98%.
- Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan stimulan web di perkotaan sebanyak 500 KK; pendamping sosial kube dan LKM yang mendapatkan bimbingan teknis di perkotaan sebanyak 14 Orang; Rekomendasi hasil analisis, kajian, kebijakan, bidang penanggulangan kemiskinan perkotaan; Laporan keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/Koordinasi, Pembinaan serta kegiatan pendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perkotaan sebanyak 4 Laporan; Dokumen perencanaan/program/anggaran/data/informasi/kebijakan pada bidang penanggulangan kemiskinan perkotaan dengan realisasi mencapai 98,51%.

31. Program Rehabilitasi Sosial, melalui kegiatan; Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza; Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan; Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak; Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial sebanyak 70 Orang; SDM yang mendapatkan bimbingan teknis pada bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 30 Orang; Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu sebanyak 1 Lembaga; Laporan Keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/Publikasi serta Pelaksanaan Rehabilitasi

dan Perlindungan sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 3 Laporan; Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran/Data/Informasi/Kebijakan bidang Rehabilitasi dan Perlindungan sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dengan realisasi mencapai 95,66 %.

- Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial 385 Orang; Laporan Keuangan / Kinerja / Monitoring / Evaluasi / Publikasi serta Pelaksanaan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Orang dengan Kecacatan 2 Laporan, Realisasi mencapai 96,83%.
- Gelandangan, Pengemis & Pemulung, Tuna Susila, Korban Trafficking Perempuan, Bekas Warga Binaan LP, Orang Dengan HIV / AIDS & Kelompok Minoritas yg Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial sebanyak 30 Orang; Laporan Keuangan / Kinerja / Monitoring / Evaluasi / Publikasi serta Pelaksanaan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial sebanyak 2 Laporan; Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran / Data dan Informasi / Kebijakan bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial dengan Realisasi mencapai 100%.
- Anak Balita , Anak Telantar & Anak Jalanan, Anak Berhadapan dgn Hukum, Anak dgn Kecacatan, Anak yg Membutuhkan Perlindungan Khusus yg mendapatkan layanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 1.430 Orang; Laporan Keuangan / Kinerja / Monitoring / Evaluasi / Publikasi serta kegiatan pendukung Pelaksanaan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak dengan realisasi mencapai 100%.
- Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Sosial sebanyak 230 Orang; SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang

Pelayanan Sosial Lanjut Usia sebanyak 62 Orang; Lembaga Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang telah dikembangkan/dibantu sebanyak 1 Lembaga; Laporan Keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/Publikasi serta Pelaksanaan Pelayanan Sosial Lanjut Usia 4 Laporan dengan realisasi mencapai 100%.

32. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, melalui kegiatan; Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan); Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Lokasi Kampung Siaga Bencana-Bencana Lokasi; Petugas Perlindungan Sosial Korban bencana Alam yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis sebanyak 200 Orang; Laporan Keuangan/Kinerja/Pembinaan Pegawai/Kekayaan Milik Negara/Evaluasi/Monitoring/Publikasi dan Pengembangan Organisasi Bidang Korban Bencana alam sebanyak 5 Laporan; Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran Bidang Korban Bencana Alam dengan realisasi mencapai 100%.
- Rekomendasi Kajian Pemetaan Desa Rawan Bencana Sosial 1 Rekomendasi; Petugas Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis sebanyak 50 Orang; Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran Bidang Korban Bencana Sosial dengan realisasi mencapai 97,47%.
- Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang bermasalah yang mendapatkan Perlindungan sebanyak 35 Orang; Laporan Keuangan/Kinerja/Pembinaan Pegawai/Kekayaan Milik Negara/Evaluasi/Monitoring/Publikasi dan Pengembangan Organisasi bidang Korban Tindak Kekerasan &

Pekerja Migran sebanyak 3 Laporan dengan realisasi mencapai 61,19%.

- Laporan Evaluasi/Monitoring/Publikasi Bidang PKH sebanyak 3 Laporan dengan realisasi mencapai 100%.
- Laporan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Atas Penyelenggara UGB dan PUB sebanyak 2 Laporan; Laporan Keuangan/Kinerja/Pembinaan Pegawai/Kekayaan Milik Negara/Evaluasi/Monitoring/Publikasi dan Pengembangan Organisasi idang Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial 7 Laporan dengan realisasi mencapai 85,70%.
- Laporan keuangan / kinerja / pembinaan pegawai / kekayaan milik negara/evaluasi/monitoring/publikasi dan pengembangan Organisasi Jamkesos dengan realisasi mencapai 100%.

33. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, melalui kegiatan; Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Jumlah laporan pelaksanaan Pemantauan PROPER, Pemantauan Kualitas Air Sungai, Inventarisasi Sumber Pencemar, dan Perhitungan Beban Pencemar (Daya Tampung), serta Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan masing-masing sebanyak 1 laporan;
- Capaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan sebesar 95%.

34. Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, melalui kegiatan; Penyuluhan Kelautan dan Perikanan kebumah. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Kelompok Perikanan Yang Disuluh sebanyak 650 kelompok; Penyuluh Perikanan sebanyak 92 orang; Dokumen kesekretariatan Kegiatan Penyuluhan KP sebanyak 7 dokumen.

35. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya KKP, melalui kegiatan; Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP; Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP; Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan Perikanan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Dokumen Lapor Wilayah Uang dan Barang sebanyak 8 dokumen; Dokumen pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KP di Provinsi sebanyak 7 laporan; Layanan Sistem Informasi sebanyak 1 Paket.

36. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan; Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan; Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap; Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan; Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI); Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan sebanyak 8 unit; Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar dan ramah lingkungan (buah) sebanyak 27 unit; Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang) sebanyak 8 orang; Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit) sebanyak 127 unit; Jumlah kapal perikanan yang terpantau dan terevaluasi (unit) sebanyak 12 unit.
- Pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran (lokasi); Pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi); Pelabuhan perikanan yang optimal memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan integrasi

& konektivitas (lokasi); Identifikasi dan penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan (lokasi) masing-masing di 1 lokasi; Penguatan sistem perizinan daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota).

- Pembinaan dan perlindungan kenelayanan sebanyak 388 orang; Peningkatan akses dan pembinaan modal usaha serta pengembangan investasi (lokasi) di 4 lokasi; Penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) sebanyak 7 KUB; Pengembangan diversifikasi usaha sebanyak 25 orang; Pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis usaha penangkapan ikan; Kelembagaan usaha yang terpantau dan terevaluasi (KUB) sebanyak 15 KUB; Nelayan yang terpantau dan terevaluasi sebanyak 1500 orang.
- Ketersediaan data statistik perikanan tangkap; Perairan yang terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya sebanyak 1 WPP; Laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya sebanyak 1 WPP; Kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan sebanyak 1 unit; Ekosistem perairan umum daratan (PUD) yang direvitalisasi sebanyak 1 lokasi.
- Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat; Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan DJPT.

37. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, melalui kegiatan; Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan; Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan; Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan; Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan; Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan; Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen

Perikanan Budidaya. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Data monitoring kualitas lingkungan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditas strategis nasional; Laboratorium HPI dan Residu yang memenuhi standar; Obat Ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan khasiatnya 1 jenis obat (kumulatif); Sampel produk perikanan budidaya yang tingkat keberterimanya 96% sebanyak 30 Sampel.
- Produksi induk unggul 22.179; Unit pembenihan skala kecil siap disertifikasi 2 Unit.
- Kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air payau sebanyak 3 Kawasan (kumulatif); Kabupaten/Kota Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya sebanyak 7 Kabupaten/Kota (kumulatif).
- Kelompok budidaya yang siap untuk disertifikasi CBIB 8 Kelompok; Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB 200 Unit (kumulatif); Pakan ikan yang terjamin mutunya 1 Jenis (kumulatif); Analisis dan publikasi data statistik perikanan budidaya. Tenaga kerja baru perikanan budidaya sebanyak 1.000 Orang.

38. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, melalui kegiatan; Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Forum Koordinasi antar aparat penegak hukum; Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelesaian TPP secara akuntabel dan tepat waktu; Laporan

Inventarisasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan; Laporan Hasil Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 13 laporan; Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS) yang berperan aktif Dalam Pengawasan SDKP sebanyak 6 kelompok; Laporan Penatausahaan, Keuangan, SIMAK BMN, Laporan Kegiatan Pengawasan SDKP.

39. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, melalui kegiatan; Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan; Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan; Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan; Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Pelaporan pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan; pelaporan pengembangan dan pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Besar dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan; Pelaporan Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi Unit Pengolahan Ikan (SKP dan SNI); Pelaporan Lokasi sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan produk hasil perikanan non pangan hasil perikanan; Pelaporan UMKM Produk Non Pangan Hasil Perikanan yang Dibina dan Dikembangkan; Pelaporan penguatan promosi dan sistem informasi peluang usaha dan investasi; Pelaporan pembinaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sektor Kelautan dan perikanan; Pelaporan usaha pengolah dan pemasar yang tumbuh baru usahanya; Entitas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan, tumbuh dan berkembang sebanyak 30 entitas usaha.
40. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melalui kegiatan; Pengelolaan dan Pengembangan

Konservasi Kawasan dan Jenis; Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha; Pendayagunaan Pesisir dan Lautan; Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Jenis Ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya sebanyak 1 Jenis; LKM pesisir yang terfasilitasi permodalannya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 10 Unit; Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya sebanyak 1 Kawasan; Kawasan pesisir yang terfasilitasi pengendalian pencemarannya sebanyak 1 Kawasan; Fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan; Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen KP3K.

41. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melalui kegiatan; Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM; Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan 1 dokumen; Dokumen Administrasi Keuangan, ketatausahaan dan Kerumahtanggaan; Laporan inspeksi dan verifikasi UPI yang memenuhi persyaratan ekspor; Dokumen harmonisasi sistem, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra; Jumlah sertifikat kesehatan produk perikanan sebanyak 3.600 sertifikat; Kegiatan peningkatan sistem sertifikasi HACCP; Laporan penerapan ISO 17025 pada laboratorium.

42. Program Pengembangan Perumahan, melalui kegiatan; Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan; Sinkronisasi Pendataan Perumahan; Fasilitasi Proses Pemberdayaan Pokja

PKP Provinsi.

43. Program Pengembangan Kepariwisata, melalui kegiatan; Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem; Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat; Pengembangan Pasar Asia Tenggara; Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara; Pengembangan Segmen Pasar Personal. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Fasilitas/pendukung amenities/fasilitas pariwisata di Kabupaten Berau; Masyarakat sadar wisata 700 Orang yang dilaksanakan di 10 lokasi KSPN se Kalimantan Timur; Partisipasi daerah pada pameran pariwisata umum dilaksanakan di Thailand bersama dengan Kementerian Pariwisata; Informasi Promosi Pariwisata Daerah; Penyelenggaraan/Partisipasi promosi pariwisata daerah terhadap event pariwisata daerah (Festival Borneo 2015) yang dilaksanakan di Samarinda.
44. Program Peningkatan Daya Saing UMKM, melalui kegiatan; Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah; telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- Promosi dan Misi Dagang telah dilaksanakan kegiatan promosi dengan menyewa tempat di gedung smesco dan berpartisipasi dalam pameran-pameran untuk mempromosikan produk unggulan Koperasi.
 - Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan KUKM Peserta Diklat SDM KUKM di Daerah. Telah dilaksanakan diklat bagi SDM KUKM yaitu diklat SKKNI, diklat bagi pendamping, diklat pengembangan UMKM berbasis potensi lokal daerah dan diklat manajemen dan akuntansi koperasi.
 - Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Pengembangan Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM dengan melaksanakan kegiatan pengawasan simpan pinjam

Koperasi.

- Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan memberikan fasilitasi pemberian ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kalimantan Timur.

45. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, melalui kegiatan; Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi; Penguatan Jejaring P2TP2A/Forum Koordinasi Lembaga Layanan PPPA di Provinsi, Kabupaten dan Kota; Pemetaan P2TP2A di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Pengelola P2TP2A mampu melaksanakan pelayanan secara komprehensif, meliputi pelayanan perlindungan dan pemberdayaan terhadap klien/korban sebanyak 40 orang peserta.
- Forum Koordinasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kota dibawah koordinasi Badan PPKB Prov Kaltim sebanyak 50 orang peserta.
- Data komprehensif tentang P2TP2A; Analisa Data P2TP2A se Kaltim; Peta Kategori P2TP2A.

46. Program Perlindungan Anak, melalui kegiatan; Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak anak di Provinsi. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Fasilitasi Provinsi dalam upaya Peningkatan Pemenuhan hak anak.

47. Program Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui kegiatan; Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain berupa dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang sebanyak 3 Dokumen.

48. Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang, melalui kegiatan; Pemanfaatan Ruang; Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah. Hasil pelaksanaan

program kegiatan antara lain; Dokumen Program operasional terkait pemanfaatan ruang; Pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah; Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran.

49. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, melalui kegiatan; Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah Wilayah I; Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah Wilayah II. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Dokumen Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota; Dokumen operasionalisasi pembinaan PPNS.

50. Program Pengembangan Perpustakaan, melalui kegiatan; Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Perpustakaan yang difasilitasi untuk Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus dengan pelaksanaan sebagai berikut : Lomba bercerita tingkat SD/MI memperoleh juara harapan III tingkat nasional; Pemilihan Pustakawan berprestasi diikuti oleh 14 Orang peserta; Lomba perpustakaan tingkat Desa/Kelurahan sebanyak 35 Perpustakaan Desa/Kelurahan yang masuk dalam 10 besar tingkat nasional; Lomba perpustakaan tingkat SLTA sebanyak 40 peserta masuk dalam 10 besar tingkat nasional; Sosialisasi minat baca bagi anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Timur diikuti 120 Orang peserta.

51. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, melalui kegiatan; Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 20 proyek.

52. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, melalui kegiatan; Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pengembangan Usaha Ekonomi Desa. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 834 desa; Bimbingan teknis dan supervise pemberdayaan masyarakat desa; Rekrutment dan pembekalan calon pendamping desa dan fasilitator pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 833 desa.
- Pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa sebanyak 150 desa; Bimbingan teknis dan supervise pengembangan usaha ekonomi desa; Laporan evaluasi pengembangan usaha ekonomi desa.

53. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, melalui kegiatan; Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain;

- Penyelenggaraan Kearsipan Nasional telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dimana telah menjadi kewajiban bagi setiap lembaga pemerintahan untuk menyelenggarakan sistem kearsipan nasional.
- Atas dasar tersebut diatas maka dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan Bagi Sekretaris Lurah dan Desa Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur, pada tanggal 29 September s.d. 1 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Hotel MJ Jalan K.H. Khalid Samarinda.
- Sumber Dana Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan Bagi Sekretaris Lurah dan Desa Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur adalah dari Dana Dekonsentrasi APBN Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA 087.013.160029/2015 tanggal 14 November 2015 (Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur).

54. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, melalui kegiatan; Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; 8 kali kegiatan pasar murah; Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah; Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri; Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya 4 Produk; Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen; Barang beredar dan jasa yang diawasi 6 Barang beredar dan jasa; Kegiatan pengawasan kemetrolagian.
55. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, melalui kegiatan; Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah; fasilitasi perdagangan luar negeri sebanyak 100 Orang; Layanan penerbitan API Online; Layanan penerbitan SKA; UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor sebanyak 8 UKM; UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor sebanyak 8 UKM.
56. Program Kepemudaan dan Keolahragaan, melalui kegiatan; Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda; Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan; Pengembangan Kepramukaan; Peningkatan Wawasan Pemuda; Pengembangan Olahraga Layanan Khusus; Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan; Pengembangan Sentra Keolahragaan; Pengembangan Pembibitan Olahragawan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Fasilitasi dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (UU No.40/2009 Ps.27ay3) sebanyak 30 orang pemuda kader,

Fasilitasi dalam Pengembangan Kepedulian, Ke-sukarelawan, dan Kepeloporan Pemuda sebanyak 55 orang pemuda kader, Fasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebanyak 170 orang pemuda kader, Fasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, lingkungan, sosial dan hukum 32 orang pemuda kader; Pengelola Organisasi Kepelajaran, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan yang difasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Dan Perencanaan Program Pelayanan Kepemudaan (Uu No.40/2009 Ps.20; Ps.40ay4) sebanyak 50 Orang; Organisasi kepramukaan (kwarnas/kwarda/kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi; Peserta Olahraga Usia Dini dan Lansia, Olahraga Penyandang Cacat, dan Olahraga di Lembaga Pemasyarakatan; Peserta festival dan invitasi olahraga tradisional sebanyak 29 Orang; PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan; Peserta Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan sebanyak 5 Orang; Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Junior/Pelajar Bertaraf Regional, Nasional.

57. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP, melalui kegiatan; Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan; Operasional Satuan Kerja dan Administrasi Pengelolaan Kegiatan; Monitoring dan Evaluasi Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; Sosialisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; rapat penyusunan program dan anggaran di kawasan perbatasan; Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Perbatasan sesuai dengan rencana aksi APBN 2014 melalui monitoring dan evaluasi; Sosialisasi tentang peraturan dan kewenangan BNPP yang di laksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 218.635.966.000 bersumber dari APBN, meningkat 2,43% dibanding dengan tahun anggaran 2014 yang berjumlah sebesar Rp. 213.439.843.000.

Tabel 5.2
Alokasi Anggaran Dekonsentrasi yang Diterima
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran 2015 (Rp)
1.	Kementerian Dalam Negeri	14,229,433,000
2.	Kementerian Pertanian	52,578,389,000
3.	Kementerian Perindustrian	2,600,000,000
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2,639,977,000
5.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	28,952,895,000
6.	Kementerian Kesehatan	20,282,391,000
7.	Kementerian Ketenagakerjaan	12,277,376,000
8.	Kementerian Sosial	16,970,658,000
9.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7,270,255,000
10.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	8,398,784,000
11.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1,224,807,000
12.	Kementerian Pariwisata	1,843,900,000
13.	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	7,860,674,000
14.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	600,000,000
15.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1,006,291,000
16.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	4,999,931,000

17.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	693,385,000
18.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	695,480,000
19..	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	23,655,567,000
20.	Arsip Nasional Republik Indonesia	371,352,000
21.	Kementerian Perdagangan	2,156,027,000
22.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	6,728,394,000
23	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	600,000,000
Total		218,635,966,000

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

5. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan dana Dekonsentrasi di tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun pemerintah daerah untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Beberapa permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut.

a. Permasalahan:

- 1) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran tidak melibatkan Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Dana Dekonsentrasi sehingga program kegiatan yang disusun tidak menjawab isu yang terjadi di daerah.
- 2) Mekanisme koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi dari Pusat sampai ke Daerah masih belum berjalan secara optimal, sehingga berdampak pada tidak efektifnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan realisasi kegiatan di daerah;
- 3) Ketidaksesuaian antara alokasi dana dalam DIPA dengan usulan alokasi dana kegiatan yang telah diusulkan oleh

daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan optimal;

- 4) Keterlambatan dalam penyampaian/penerbitan DIPA, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan ke daerah sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan di daerah karena minimnya waktu pelaksanaan dan tidak adanya acuan untuk menjalankan kegiatan;
- 5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menjalankan program/kegiatan dana dekonsentrasi di daerah, serta terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai aplikasi pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Peraturan Pemerintah 39/2006 yang disebabkan terjadinya mutasi pada personil pengelola kegiatan, sehingga berdampak pula pada terlambatnya penyampaian pelaporan pelaksanaan.
- 6) Beragamnya format pelaporan yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementrian/Lembaga juga menghambat dalam proses pelaporan;
- 7) Ketidakselarasan kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker) yang terdapat di Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat yang menjadi penanggungjawab dan pelaksana di daerah, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala.
- 8) Standarisasi biaya APBN (perjalanan dinas dalam daerah, transportasi, konsumsi dan lain-lain) yang dialokasikan terhitung rendah dan tidak relevan dengan kondisi di daerah terutama biaya perjalanan dinas atau biaya monitoring ke Perbatasan, sehingga kegiatan menjadi terkendala.

b. Solusi:

Dari permasalahan yang ada, langkah solusi yang masih harus dilakukan adalah oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yaitu :

- 1) Isu-isu strategis perlu disusun sebelum membuat RKA-KL sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar mengakomodir apa yang menjadi isu strategis di daerah sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan dapat sinergi dengan kebijakan dan usulan Pemerintah Daerah;
- 2) Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah, antar SKPD Provinsi, dan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota pengelola APBN secara berkelanjutan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas aparatur dan dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien;
- 3) Pemerintah Pusat sebaiknya lebih memperhatikan dan mengakomodir dengan lebih baik setiap usulan kegiatan dan anggaran yang telah diajukan oleh daerah.
- 4) Pemerintah Pusat diharapkan dapat melakukan penyampaian DIPA, juklak dan juknis ke daerah secara lebih cepat dan tepat waktu;
- 5) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana Dekon di daerah melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop serta bimtek secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan karena aparatur yang bertugas seringkali mengalami mutasi/dipindahkan ke SKPD lain;
- 6) Perlu penyeragaman format pelaporan APBN secara *on line*, sehingga fungsi pengendalian evaluasi dapat berjalan dengan optimal;

- 7) Sinkronisasi struktur Organisasi/Kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker) Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat;
- 8) Besaran alokasi anggaran tahun 2016 agar dapat menyesuaikan dengan standar biaya setempat;
- 9) Evaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan, sebagai feedback untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
- 10) Kabupaten/Kota menyediakan anggaran dan SDM Pendamping bagi penerima manfaat.

B. Tugas Pembantuan yang diterima

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari system dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan.

Adapun penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Tugas Pembantuan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Penunjukkan, Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Serta Pengesahan dan Pelaksana DIPA Tahun 2009;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 bersumber dari 11 Kementerian, dilaksanakan oleh 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dapat dilihat pada table 5.2.

Tabel 5.3
Daftar Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

NO	KEMENTERIAN		SKPD PROVINSI	SKPD KABUPATEN/KOTA
1.	Kementerian Dalam Negeri			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
				Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan

				Sipil Kota Samarinda
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
2.	Kementerian Pertanian	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur		Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
		Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda
		Dinas pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara
				Dinas Pertanian dan Perkebunan Tanah Grogot Kabupaten Paser
				Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
				Dinas Pertanian dan Peteranakan Kabupaten Kutai Timur
				Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara
				Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat
3.	Kementerian Kesehatan			RSU Parikesit
				Rsud I. A Moeis Kota Samarinda
				Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
				Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat
				Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
				Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam

				Paser Utara
				Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kertanegara
				Rsud Abdul Wahab Syahrani
				Dinas Kesehatan Kota Samarinda
				Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
				Dinas Kesehatan Kota Bontang
				Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu
				Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
4.	Kementerian Ketenagakerjaan			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Paser
				Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat
				Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara
5.	Kementerian Sosial		Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	-
6.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			Dinas Kehutanan Kabupaten Berau
7.	Kementerian Kelautan dan Perikanan		Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
				Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kertanegara
				Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan
				Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bontang
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Kalimantan Timur	-

9.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur
10.	Kementerian Perdagangan		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda
11.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan		-	Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

3. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebanyak 11 program dan 40 kegiatan mencapai realisasi rata-rata 59,74%.

Program kegiatan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, meliputi kegiatan; Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi; Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain: Laporan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi; Lokasi Ubian Kedelai di 5 Lokasi; Peningkatan Produktifitas melalui gerakan penerapan pengelola tanaman Pangan (GP-PTT) 250 Ha; Pemberdayaan 3 unit penangkar benih tanaman pangan; Laporan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan; Dukungan Sarana Pascapanen Jagung sebanyak 3 Unit; Dukungan Sarana produksi untuk kawasan

perbatasan/daerah tertinggal sebanyak 2 Unit; Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebanyak 34 Unit.

2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan, meliputi kegiatan; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan; Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Pengembangan Tanaman Lada [Base Line] 800 Ha; Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar [Base Line] sebanyak 72 Orang; Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar [Base Line] seluas 2 Ha; Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 12 Bulan.
- Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit [Base Line] seluas 100 Ha; Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) [Base Line] 6 Laporan; Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan [Base Line] seluas 5 Ha; Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan [Base Line] 12 Bulan.
- Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan [Base Line] 2 KT; Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan [Base Line] 2 Kasus; Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan [Base Line] 1 Provinsi.
- SL-PHT Perkebunan [Base Line] 6 KT; Antisipasi Dampak Perubahan Iklim [Base Line] 7 Dokumen; Pemberdayaan petugas pengamat opt [Base Line] 20 Orang.

3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan, melalui kegiatan; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan; Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha; Dukungan Perlindungan Perkebunan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar 2 Ha; Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar; Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim;
- Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet); Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan 5 Ha; Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan;
- Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan sebanyak 2 KT; Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan sebanyak 2 Kasus; Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
- SL-PHT Perkebunan 4 KT; Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 2 Dokumen; Pemberdayaan petugas pengamat opt sebanyak 20 Orang.

4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, meliputi kegiatan; Peningkatan Produksi Ternak; Peningkatan Produksi Pakan Ternak; Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit; Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Pengembangan Budidaya Sapi Potong sebanyak 12 Kelompok; Penyediaan Sarana dan Peralatan IB sebanyak 26 Unit; Penyebaran Pejantan Kerbau (INKA) sebanyak 90 Ekor;

Pengembangan Budidaya Ayam Lokal di Pedesaan sebanyak 2 Kelompok; Pengembangan Budidaya Kelinci sebanyak 1 Kelompok.

- Penguatan sumber bibit/benih hijauan pakan ternak di UPTD 1 Unut; Pemanfaatan Lahan Ex Tambang Untuk Pengembangan HPT 100 Ha; Pengembangan Integrasi Ternak-Sawit sebanyak 9 Kelompok; Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas 81.000 Stek; Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia 1 Kelompok.
 - Pembibitan Sapi Potong 1 Kelompok; Pembibitan Kambing / Domba 1 Kelompok; Pembibitan Ayam Lokal 2 Kelompok; Penguatan sapi / Kerbau Betina bunting 6 Kelompok; Fasilitasi Operasional Perbibitan di UPTD; Penyediaan Bibit Ternak di UPTD sebanyak 12 Ekor; Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebanyak 6 Unit.
 - Fasilitasi peralatan RPH ruminansia 2 Unit; Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesmavet 2 unit.
5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian, meliputi kegiatan; Pengembangan Pemasaran Domestik; Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain: Pengembangan Informasi Pasar; Fasilitasi Kebijakan Stabilisasi Harga; Laporan Kegiatan dan Investasi; Laporan Kegiatan dan Pembinaan.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui kegiatan; Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian; Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; Fasilitas Pupuk dan Pestisida; Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain: Laporan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

7. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, melalui kegiatan; Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain: Rumah bagi Warga KAT sebanyak 50 Unit; Warga KAT yang mendapat Bantuan Jaminan Hidup sebanyak 100 KK; Warga Kat yang mendapat Bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga, Bibit Tanaman Keras dan Sertifikasi Lahan sebanyak 50 KK; Infrastruktur di Lingkungan warga KAT. Realisasi mencapai 100%.
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, melalui kegiatan; Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan; Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain: Unit pembenihan skala besar yang siap disertifikasi sebanyak 40 Unit.
9. Program Penyelenggaraan Jalan, melalui kegiatan; Peningkatan Struktur Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:
 - Dilakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 50,50 Km (panjang fungsional) pada ruas jalan dalam kota Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Kabupaten Berau.
 - Dilakukan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 14,77 Km (panjang efektif) dan dilakukan peningkatan kapasitas struktur jalan sepanjang 1,50 km (panjang efektif). Aktivitas yang dilakukan dalam pemeliharaan rutin jalan yaitu: pemotongan rumput, perbaikan saluran drainase dan pengecatan marka jalan. Sementara dalam pemeliharaan berkala jalan dilakukan kegiatan overlay (lapis permukaan aspal). Dan pada kegiatan

peningkatan jalan dilakukan penambahan lebar jalan sepanjang 2,00 Km pada ruas Jalan Syariffudin-Yoes Balikpapan.

10. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, melalui kegiatan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi; Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; Pelayanan Pertanahan Transmigrasi. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara yaitu Belanja modal fasilitas umum berupa SAB (Sarana Air Bersih) 3 titik sumur bor dan gentong plastik 3 unit dan sudah terealisasi 100%. Dan belanja modal perlengkapan bangunan fasilitas umum sebanyak 3 unit dan sudah terealisasi sebesar 100%.
11. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans), melalui kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; Pembangunan Permukiman Transmigrasi; Penyediaan Tanah Transmigrasi; Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu Peningkatan jalan penghubung/poros di UPT Tepian langsung SP.3 sepanjang 5 km, dan telah terealisasi fisik sebesar 100%. Hasil pendataan akhir tanggal 2 juli yang berhak menerima sebanyak 19 KK. Untuk kompensasi lahan berupa sapi sebanyak 11 ekor untuk 19 KK termasuk 19 kandang.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota tahun 2015 sebanyak 16 program dan 35 kegiatan mencapai realisasi rata-rata 75,25 %.

Program kegiatan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD di tingkat Kabupaten/Kota antara lain:

1. Program program penataan administrasi kependudukan, melalui kegiatan: pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu di 10 Kabupaten/Kota.
2. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, melalui kegiatan: Peningkatan Produksi Ternak; Peningkatan Produksi Pakan Ternak; Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Buah 100 Ha; Sekolah Lapang GAP 2 Kelompok; Sekolah Lapang GHP 1 Kelompok; Sarana Prasarana Pascapanen 267 Unit di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Sekolah Lapang GAP 1 Kelompok; Sarana Prasarana Budidaya 18 Unit; Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat 18 Unit; Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran 13 Ha; Pengembangan Kawasan Tanaman Obat 14 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura 3 Kali di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura 1 Laporan; Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura 1 Dokumen; Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan, melalui kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura; Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah

Lingkungan; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura 5 Laporan di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Samarinda.
 - Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura 9 Dokumen di Kabupaten Penajam Paser Utara, Berau, Kutai Timur, Paser dan Kota Samarinda.
 - Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura 24 Kali di Kabupaten Kutai Timur, Berau, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Samarinda.
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Buah 362 Ha di Kabupaten Penajam Paser Utara, Berau, Kutai Timur dan Paser.
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura seluas 5.000 M2 di Kota Samarinda.
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Obat seluas 48 Ha di Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Samarinda.
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran seluas 43 Ha di Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser dan Kota Samarinda.
 - Sarana Prasarana Budidaya 4 unit di Kota Samarinda.
 - Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat 153 Unit di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - Sarana Prasarana Pascapanen 1099 Unit di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Paser dan Kota Samarinda.
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, melalui kegiatan: Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang

dan Umbi Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Hasil pelaksanaan program kegiatan, yaitu:

- Peningkatan Produktifitas Melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai 250 Hektar di Kabupaten Berau;
 - Laporan pengelolaan produksi serealialia di Kabupaten Berau, Paser, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara;
 - Laporan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi 3 Laporan di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Berau;
 - Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan 10 Laporan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Paser, Kutai Timur dan Berau;
 - Jumlah Lokasi Ubinan Padi/Jagung 201 Lokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser;
 - Jumlah Lokasi Ubinan Kedelai 5 Lokasi di Kabupaten Berau;
 - Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Komoditas Padi seluas 7.500 Ha di Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Berau;
 - Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Komoditas Jagung 500 Ha di Kabupaten Berau;
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan di Kabupaten Paser;
 - Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan 48 Bulan di Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Berau.
5. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, melalui kegiatan: Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan; Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu: Pengembangan

Tanaman Karet 200 Ha; Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) 1 Laporan; Peralatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Perkebunan (Base Line).

6. Program Pembinaan Upaya Kesehatan, melalui kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar; Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu:
 - Alat Kesehatan/Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar 124 Unit; Layanan Perkantoran 7 Bulan Layanan.(RSUD A.wahab syahrane).
 - Kendaraan Bermotor Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar 2 Unit ; Lat kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan dasar : 5 unit. (Mahulu)
 - Alat Kesehatan/kedokteran yang mendukung pelayanan dasar ; 5 unit, Layanan Perkantoran 9 bulan; Gedung bangunan : 50 M2. (Kutai timur)
7. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, melalui kegiatan; Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu: Bantuan operasional kesehatan sebanyak 180 puskesmas di Kabupaten Paser, Mahakam Ulu, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang.
8. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, melalui kegiatan; Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu: Padat Karya Infrastruktur sebanyak 528 Orang.
9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, melalui kegiatan; pengembangan sarana distribusi perdagangan. Capaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan 95%.
10. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, melalui kegiatan; Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana

Pembudidayaan Ikan; Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan; Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu :

- Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
- Pembudidaya yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya 3 Kelompok di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Perencanaan, Kerjasama, Evaluasi, dan Pelaporan Program dan Anggaran Berdasarkan data Terkini dan Akurat 4 Dokumen di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
- Pengelolaan keuangan, aset milik negara (SAI, SABMN, PNBP) dan administrasi persuratan 2 Dokumen di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 10 Unit di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelompok budidaya yang siap untuk disertifikasi CBIB 2 Kelompok di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Pengembangan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya 2 Dokumen di Kabupaten Kutai Kartanegara.

11. Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, melalui kegiatan; Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan; Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu : Coldstorage yang dibangun/dioperasikan di sentra perikanan terpadu di Kota Balikpapan; Pusat Distribusi ikan yang dibangun/dikembangkan melalui penguatan konektivitas hulu hilir di Kota Bontang; Sarana dan prasarana Sistem Rantai Dingin yang digunakan dalam rangka distribusi hulu hilir di Kota Bontang.

12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan; Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu : Pengembangan kampung nelayan yang mandiri, indah, tangguh, dan maju (sekaya maritim) sebanyak 2 Lokasi Kota Bontang; Pengembangan Kelembagaan mendukung pengembangan Kampung Nelayan yang mandiri, indah, tangguh, dan maju (sekaya maritim) di Kota Bontang.
13. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, melalui kegiatan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; Pembangunan Permukiman Transmigrasi. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu : Peningkatan Jalan Poros/Penghubung Lokasi UPT. Krayan IIA/Desa Krayan Jaya (Desa Jemparing); Peningkatan Jalan Desa dan Lingkungan Lokasi UPT. Kayungo IC (Desa Kerja Bakti) Kecamatan Long Ikis.
14. Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi; Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu : Program dan Anggaran Berbasis Kinerja Satuan Kerja; Laporan Pelaksanaan Tugas dan Kinerja sebanyak 17 Laporan; Bangunan Fasilitas Umum 4 Unit; Layanan Sosial Budaya di SP/KPB/Kawasan; Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Yang Terbentuk Dan Berfungsi di SP / KPB / Kawasan di 2 Lembaga.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2015

sebesar Rp 666.606.199.000 bersumber dari APBN, meningkat lebih 100% dibanding dengan tahun anggaran 2014 yang berjumlah sebesar Rp 215.738.747.000 dapat di lihat di tabel 5.2.

Tabel 5.4
Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan yang Diterima SKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 dan 2015

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran 2014 (Rp)	Anggaran 2015 (Rp)
1.	Kementerian Dalam Negeri	8,140,008,000.00	13,342,017,000
2.	Kementerian Pertanian	65,048,413,000	458,195,258,000
3.	Kementerian Kesehatan	34,290,420,000	70,899,610,000
4.	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	23,280,772,000	2,547,512,000
5.	Kementerian Sosial	2,071,757,000	2,244,932,000
6.	Kementerian Kelautan & Perikanan	4,880,930,000	11,193,955,000
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12,225,610,000	24,952,685,000
8.	Pekerjaan Umum	56,300,837,000	55,844,992,000
9.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	1,611,605,000
10.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	2,000,000,000	-
11.	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	7,500,000,000	-
12.	Kementerian Perdagangan	-	6,000,000,000
13.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi	-	19,773,633,000
Total		215,738,747,000	666,606,199,000

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 dan 2015

5. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan dana tugas pembantuan di tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun pemerintah daerah untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Beberapa permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut.

a. Permasalahan

- 1) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran tidak melibatkan Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pembantuan sehingga program kegiatan yang disusun tidak menjawab isu yang terjadi di daerah.
- 2) Mekanisme koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi dari Pusat sampai ke Daerah masih belum berjalan secara optimal, sehingga berdampak pada tidak efektifnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan realisasi kegiatan di daerah.
- 3) Ketidaksesuaian antara alokasi dana dalam DIPA dengan usulan alokasi dana kegiatan yang telah diusulkan oleh daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan optimal.
- 4) Keterlambatan dalam penyampaian/penerbitan DIPA, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan ke daerah sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan di daerah karena minimnya waktu pelaksanaan dan tidak adanya acuan untuk menjalankan kegiatan;
- 5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menjalankan program/kegiatan Tugas Pembantuan di daerah.
- 6) Beragamnya format pelaporan yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga menghambat dalam proses pelaporan.

- 7) Ketidakselarasan kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker) yang terdapat di Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat yang menjadi penanggungjawab dan pelaksana di daerah, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala.
- 8) Standarisasi biaya APBN (perjalanan dinas dalam daerah, transportasi, konsumsi dan lain-lain) yang dialokasikan terhitung rendah dan tidak relevan dengan kondisi di daerah terutama biaya perjalanan dinas atau biaya monitoring ke Perbatasan, sehingga kegiatan menjadi terkendala.

b. Solusi

- 1) Isu-isu strategis perlu disusun sebelum membuat RKA-KL sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar mengakomodir apa yang menjadi isu strategis di daerah sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan dapat sinergi dengan kebijakan dan usulan Pemerintah Daerah;
- 2) Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah, antar SKPD Provinsi, dan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota pengelola APBN secara berkelanjutan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas aparatur dan dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien;
- 3) Pemerintah Pusat sebaiknya lebih memperhatikan dan mengakomodir dengan lebih baik setiap usulan kegiatan dan anggaran yang telah diajukan oleh daerah.
- 4) Pemerintah Pusat diharapkan dapat melakukan penyampaian DIPA, juklak dan juknis ke daerah secara lebih cepat dan tepat waktu;
- 5) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana Tugas Pembantuan di daerah melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop serta bimtek secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan karena

aparatur yang bertugas seringkali mengalami mutasi/dipindahkan ke SKPD lain;

- 6) Perlu penyeragaman format pelaporan APBN secara *on line*, sehingga fungsi pengendalian evaluasi dapat berjalan dengan optimal;
- 7) Sinkronisasi struktur Organisasi/Kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker) Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat;
- 8) Besaran alokasi anggaran tahun 2016 agar dapat menyesuaikan dengan standar biaya setempat;
- 9) Evaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan, sebagai feedback untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;